

Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut Nasional untuk Menjaga Stabilitas Wilayah Laut Indonesia

Oleh :

Novan Brhamasta

Dosen : Noor Fatimah Mediawati

*Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

Pendahuluan

Wilayah laut Indonesia menjadi tempat yang paling strategis karena letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, tantangan besar muncul dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah ini, termasuk masalah pelanggaran hukum laut, illegal fishing, serta ancaman terhadap kedaulatan negara .

Penegakan hukum yang optimal dalam wilayah laut Indonesia juga memiliki dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun politik. Dengan memastikan keamanan dan kedaulatan di laut nasional, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi geopolitiknya, serta meningkatkan kerja sama regional dalam bidang keamanan maritim.

Upaya optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional juga menjadi prioritas dalam konteks perkembangan dinamika global, terutama dalam menghadapi ancaman transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme yang semakin merambah ke wilayah maritim. Keberadaan wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas nasional serta mempengaruhi keberlangsungan ekonomi negara.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- (1) Bagaimana penegakan hukum dilakukan di laut nasional Indonesia?
- (2) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan di wilayah laut Indonesia?
- (3) Bagaimana peningkatan penegakan hukum dan kedaulatan dapat berkontribusi pada stabilitas wilayah laut Indonesia?

Metode

Metode penelitian jurnal ini mengusulkan metode sosiologis yuridis dengan pendekatan perundang-undangan melalui penalaran deduktif yang mengintegrasikan analisis dokumen, observasi lapangan, dan teknik wawancara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum laut dan keamanan maritim.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di lau nasional memang menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, mengingat wilayah lautnya yang luas dan keragaman aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terpadu antara berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementrian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifikasi patroli laut. Hal ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal diperairan Indonesia, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan maritim.

Pembahasan

a. Penegakan Hukum Laut Nasional Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan di laut nasional Indonesia. Salah satu fokus utama KKP adalah mengawasi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Peran KKP dalam penegakan hukum di laut nasional Indonesia sangatlah penting. Dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan melalui kerjasama internasional, KKP berperan aktif dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Dengan memberikan landasan hukum, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan juga menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Ini termasuk sanksi pidana dan administratif yang dapat diberlakukan terhadap individu atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, atau perdagangan ilegal hasil perikanan. Melalui kerangka hukum yang kokoh ini, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa penegakan hukum di laut nasional dilakukan secara efektif dan adil.

Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi dan tantangan baru, Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan laut nasionalnya.

Pembahasan

b. Tantangan dalam Menjaga Kedaulatan

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga kedaulatan di wilayah lautnya, terutama dengan munculnya masalah seperti penyelundupan, illegal fishing, dan intrusi asing. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung penegakan hukum di laut.

Meskipun Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk masalah sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan pendanaan yang memadai.

Penggunaan teknologi modern, seperti sistem pemantauan satelit dan aplikasi digital, juga memberikan kontribusi besar dalam mendukung penegakan hukum di laut. Teknologi ini memungkinkan pemantauan aktivitas di perairan Indonesia dengan lebih akurat dan efisien. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi faktor krusial dalam upaya mencegah eksploitasi berlebihan di perairan Indonesia. Dengan bergabung dalam perjanjian dan kerja sama regional dan internasional, Indonesia dapat memperoleh dukungan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Pembahasan

c. Peningkatan Penegakan Hukum dan Kedaulatan

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan menegakkan hukum di perairan nasional guna melindungi sumber daya alam dan kepentingan ekonomi negara.

KKP secara aktif melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia menggunakan kapal patroli dan pesawat udara untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum. Mereka juga berperan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional dalam penegakan hukum di perairan yang bersama-sama diakses adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah laut.

Dengan kesadaran akan pentingnya keamanan laut sebagai bagian integral dari kedaulatan negara, Indonesia dapat terus bergerak maju dalam memperkuat penegakan hukum di laut, menjaga stabilitas wilayah lautnya, dan memastikan bahwa sumber daya laut yang berlimpah menjadi keuntungan bagi bangsa dan negara.

Temuan Penting Penelitian

Optimalisasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut nasional memang menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas wilayah laut Indonesia.

Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, mengingat wilayah lautnya yang luas dan keragaman aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terpadu antara berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan kepolisian. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan patroli laut.

Selain upaya patroli dan kerja sama regional, peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim juga diperlukan. Hal ini meliputi pelatihan dan pengadaan peralatan yang memadai bagi petugas penegak hukum, serta penyusunan regulasi yang lebih ketat dan efektif dalam menangani berbagai jenis kejahatan di laut.

Manfaat Penelitian

Penegakan hukum yang efektif dan pemeliharaan kedaulatan laut merupakan elemen kunci untuk mencegah konflik dan mengamankan sumber daya laut. Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam meningkatkan penegakan hukum maritim serta mengamankan kedaulatan laut Indonesia.

Referensi

- [1]Haryono, B. and A. Setiawan, “Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut Nasional untuk Menjaga Stabilitas Wilayah Laut Indonesia,” *Jurnal Hukum Maritim*, vol. 8, no. 1, pp. 45–60, 2022.
- [2]Wahyudi, D. and F. Santoso, “Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum di Laut Nasional Indonesia ,” *Jurnal Kedaulatan Maritim*, vol. 15, no. 2, pp. 120–135, 2023.
- [3]Utomo, R. and B. Prabowo, “Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Laut Nasional : Tinjauan dari Aspek Ekonomi dan Politik,” *Jurnal Kajian Maritim*, vol. 10, no. 2, pp. 75–90, 2024.
- [4]Saputra, A. and B. Mulyadi, “Kerja Sama Regional dalam Penegakan Hukum Laut Nasional Indonesia,” *Jurnal maritim ASEAN*, vol. 5, no. 3, pp. 180–195, 2022.
- [5]Widodo, A and M. Timbul, “Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Maritim di Indonesia: Studi Kasus di Wilayah Laut Jawa,” *Jurnal Hukum Maritim dan Perikanan*, vol. 10, no. 2, pp. 123–157, 2018.
- [6]Susanto, B.,et al. “Dampak Perdagangan Manusia di Wilayah Laut Indonesia terhadap Kedaulatan Negara : Studi Kasus dar Kepulauan Riau,” *Jurnal Keamanan dan Kedaulatan Maritim*, vol. 5, no. 1, pp. 45–58, 2019.
- [7]Hadi, S. , et al. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Illegal Fishing di Laut Indonesia: Dampak terhadap Stabilitas Ekosistem dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir,” *Jurnal sumber daya maritim*, vol. 12, no. 3, pp. 211–226, 2020.
- [8]Nasution, A. “ Peran Nelayan dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim,” *jurnal pertahanan dan bela negara*, vol. 8, no. 1, pp. 63–82, 2018.
- [9]Herlambang,S and S. Suryo Putro, “Peran TNI AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia,” *jurnal maritim indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 118–131, 2022.
- [10]Triadi and Irwan, “kewenangan badan keamaan laut (BAKAMLA) dalam penegakan hukum keamanan laut di wilayah perairan indonesia,” *Triwikrama : jurnal ilmu sosial 1*, vol. 8, pp. 100–110, 2023.

